



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR SK.1156/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2023

TENTANG

**DATA DAN INFORMASI KEGIATAN USAHA YANG TELAH TERBANGUN DI
DALAM KAWASAN HUTAN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG
KEHUTANAN TAHAP XVIII**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan perlu dilakukan inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan;
- b. bahwa data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas kegiatan usaha perkebunan, pertambangan, dan kegiatan lainnya meliputi minyak dan gas bumi, panas bumi, tambak, pertanian, permukiman, wisata alam, industri, dan/atau sarana dan prasarana;

- c. bahwa sesuai Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah;
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
10. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.203/MENLHK/SETJEN/KUM./5/2021 tentang Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Undang-Undang tentang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor
SK.641/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2022
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
SK.203/MENLHK/SETJEN/KUM./5/2021 tentang
Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian
Implementasi Undang-Undang tentang Cipta Kerja
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.359/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2021 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan;
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.531/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2021 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap II;
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1217/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2021 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap III;
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap IV;
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.298/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2022 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam

Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap V;

7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.652/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2022 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap VI;
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.787/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2022 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap VII;
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1077/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2022 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap VIII;
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1205/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2022 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap IX;
11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1345/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2022 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap X;
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.196/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2022 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam

Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XI;

13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.227/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2022 tentang Percepatan Proses Penyelesaian Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Perizinan di Bidang Kehutanan sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.322/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2022 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XII;
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.604/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XIII;
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.952/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XIV;
17. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.661/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2023 tentang Penetapan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

18. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.662/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2023 tentang Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.815/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2023 tentang Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan sebagai Implementasi Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1069/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XV.
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1143/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XVI.
22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1153/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XVII.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG DATA DAN INFORMASI KEGIATAN USAHA YANG TELAH TERBANGUN DI DALAM KAWASAN HUTAN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN TAHAP XVIII.

KESATU : Menetapkan Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XVIII sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Data dan informasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

- a. subjek hukum;
- b. jenis kegiatan;
- c. lokasi kegiatan yang meliputi wilayah administratif, kawasan hutan, dan kesesuaian ruang;
- d. luasan indikatif areal terbuka; dan
- e. skema penyelesaian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

KETIGA : Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Amar KEDUA akan dipergunakan sebagai dasar untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut guna mengetahui kebenaran dan kesesuaiannya dengan fakta lapangan berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

KEEMPAT : Luasan Indikatif areal terbuka sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA huruf d, ditetapkan setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan data dan persyaratan, pemeriksaan melalui citra satelit dan/atau pemeriksaan di Lapangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau pemutakhiran data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 November 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
6. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
7. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
8. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.1156/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2023
TANGGAL : 2 NOVEMBER 2023
TENTANG : DATA DAN INFORMASI KEGIATAN USAHA YANG TELAH TERBANGUN DI DALAM KAWASAN HUTAN
YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN TAHAP XVIII

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
1.	PD, Makmur Sepakat	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HL		±60	Pasal 110 A/Pasal 110 B
2.	Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HL, HP		±6.174	Pasal 110 A/Pasal 110 B
3.	Aceh Rubber, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HL		±550	Pasal 110 A/Pasal 110 B
4.	Al-Kautsar	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HP		±81	Pasal 110 A/Pasal 110 B
5.	Aloer Timur, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HP		±1.104	Pasal 110 A/Pasal 110 B
6.	Atakana, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HP		±4.181	Pasal 110 A/Pasal 110 B
7.	Benih Tamiang, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HP		±1.106	Pasal 110 A/Pasal 110 B
8.	Beuna Coklat Corp, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HPT		±4.700	Pasal 110 A/Pasal 110 B
9.	Beurata Maju, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HP		±1.712	Pasal 110 A/Pasal 110 B
10.	Boswa Megalopolis, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HPT		±6.218	Pasal 110 A/Pasal 110 B

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
11.	Bumi Flora, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HP		±4.459	Pasal 110 A/Pasal 110 B
12.	Cakra Multi Sawit Mandiri, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HP		±120	Pasal 110 A/Pasal 110 B
13.	Dani Putra, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HP		±5.026	Pasal 110 A/Pasal 110 B
14.	Dani Putra Nugra Utama, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HL, HP		±5.045	Pasal 110 A/Pasal 110 B
15.	Jaya Bhani Utama, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HP		±1.505	Pasal 110 A/Pasal 110 B
16.	Jaya Kumita Mulia, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HL, HP		±2.137	Pasal 110 A/Pasal 110 B
17.	Krueng Bayeun-S. Simpang Kanan, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HP		±9.956	Pasal 110 A/Pasal 110 B
18.	Mekar Aresta Utama, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HP		±114	Pasal 110 A/Pasal 110 B
19.	Mestika Prima Lestari Indah, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HP		±2.359	Pasal 110 A/Pasal 110 B
20.	Paoh Laot Perkasa, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HL, HPT		±4.913	Pasal 110 A/Pasal 110 B
21.	Parasawita, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HP		±1.075	Pasal 110 A/Pasal 110 B
22.	Patriot Rimba Nusa Lestari, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HL, HP		±8.894	Pasal 110 A/Pasal 110 B
23.	Perkebunan I Sebuluh Salam, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	-		±4.462	Pasal 110 A/Pasal 110 B

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
24.	Perkebunan V Cot Girek, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HP		±15.594	Pasal 110 A/Pasal 110 B
25.	Persati, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HP		±6.789	Pasal 110 A/Pasal 110 B
26.	Potensi Bumi Sakti, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HL, HP		±6.741	Pasal 110 A/Pasal 110 B
27.	Pulau Raya Sentosa, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HP		±133	Pasal 110 A/Pasal 110 B
28.	Purindo Ranandra, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HP		±2.782	Pasal 110 A/Pasal 110 B
29.	Putra Bumoe Aceh, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HP		±429	Pasal 110 A/Pasal 110 B
30.	Rhundeng Putra Persada, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HPK		±1.328	Pasal 110 A/Pasal 110 B
31.	Sam Karya Abadi, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HL, HP		±154	Pasal 110 A/Pasal 110 B
32.	Satya Agung, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	-		±8.697	Pasal 110 A/Pasal 110 B
33.	Semadam, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	-		±2.382	Pasal 110 A/Pasal 110 B
34.	Sinar Lentera Mandiri, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HP		±201	Pasal 110 A/Pasal 110 B
35.	Sri Musara Lestari Indah, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	-		±5.713	Pasal 110 A/Pasal 110 B
36.	Sumber Utama Makmur, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HPK		±1.456	Pasal 110 A/Pasal 110 B

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
37.	Surya Panen Subur, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	-		±1	Pasal 110 A/Pasal 110 B
38.	Tegas Nusantara, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HL, HP		±4.247	Pasal 110 A/Pasal 110 B
39.	Teunggulun Raya, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HL		±1.670	Pasal 110 A/Pasal 110 B
40.	Tualang Raya, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HP		±5.440	Pasal 110 A/Pasal 110 B
41.	Ujung Raja Nusa, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HP, HPT		±117	Pasal 110 A/Pasal 110 B
42.	Watu Gede Utama, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HL		±6.259	Pasal 110 A/Pasal 110 B
43.	Woyla Raya Abadi, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HPT		±7.091	Pasal 110 A/Pasal 110 B
44.	Perkebunan Nusantara I Blang Tualang, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Aceh	HP		±4.201	Pasal 110 A/Pasal 110 B
45.	Jhony	Perkebunan Kelapa Sawit	Riau	-		±65,36	Pasal 110 B/Penataan Kawasan Hutan
46.	Mitra Karya Sentosa, PT	Perkerkebunan Kelapa Sawit	-	-		-	Pasal 110 A/Pasal 110 B
47.	STAL, PT	Perkerkebunan Kelapa Sawit	-	-		-	Pasal 110 A/Pasal 110 B
48.	Sawitkarya Manunggul, PT	Perkerkebunan Kelapa Sawit	-	-		-	Pasal 110 A/Pasal 110 B
49.	Samora Usaha Jaya, PT	Perkerkebunan Kelapa Sawit	-	-		-	Pasal 110 A/Pasal 110 B

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
50.	Serbahuta Jaya, PT	Perkerkebunan Kelapa Sawit	-	-		-	Pasal 110 A/Pasal 110 B
51.	KUD Rahmat Tani (RATA)	Perkerkebunan Kelapa Sawit	Kab. Langkat, Sumatera Utara	HP, HPT, HPK		±1.500	Pasal 110 A/Pasal 110 B
52.	Agro Bukit, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Seruyan, Kalimantan Tengah				Pasal 110 A/Pasal 110 B
53.	Alam Tri Abadi, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Tabalong, Kalimantan Selatan				Pasal 110 A/Pasal 110 B
54.	Ali Amran dkk	Perkebunan Kelapa Sawit	Bengkalis, Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B
55.	Ali, dkk	Perkebunan Kelapa Sawit	Kampar, Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B
56.	Andi Ardinta, dkk	Perkebunan Kelapa Sawit	Rokan Hilir, Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B
57.	Anugerah Langkat Makmur II, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Langkat, Sumatera Utara				Pasal 110 A/Pasal 110 B
58.	Arjuna	Perkebunan Kelapa Sawit	Katingan, Kalimantan Tengah				Pasal 110 A/Pasal 110 B
59.	Asosiasi Saudara Tani Rakit Kulim	Perkebunan Kelapa Sawit	Indragiri Hulu, Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B
60.	Budi Nusa Cipta Wahana, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Lampung Utara, Lampung				Pasal 110 A/Pasal 110 B
61.	Citra Kalbar Sarana, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Kapuas Hulu, Kalimantan Barat				Pasal 110 A/Pasal 110 B
62.	Citra Palma Kencana, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Indragiri Hilir, Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
63.	Dahlius, Amril, Dt. Bandaro, Diski, Ade Rahmat Mulyono	Perkebunan Kelapa Sawit	Kampar, Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B
64.	Dedy Amsyah Putra Dalimunthe	Perkebunan Kelapa Sawit	Labuhan Batu, Sumatera Utara				Pasal 110 A/Pasal 110 B
65.	Dewan Pimpinan Pusat Coperlink LBH-SLIM-PERS	Perkebunan Kelapa Sawit	Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B
66.	Dongin Prabhawa	Perkebunan Kelapa Sawit	Merauke, Papua Selatan				Pasal 110 A/Pasal 110 B
67.	Eka Sumahamid, Delfan Syukri, Azmi, Nekirenalia	Perkebunan Kelapa Sawit	Kampar, Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B
68.	Erfa Eriyanti, Reslan Arcan	Perkebunan Kelapa Sawit	Kampar, Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B
69.	Falcon Agripersada, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Ketapang, Kalimantan Barat				Pasal 110 A/Pasal 110 B
70.	Fenyen Agro Lestari, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Bangka Selatan, Bangka Belitung				Pasal 110 A/Pasal 110 B
71.	Forum Pembela Hak-Hak Masyarakat Tempat	Perkebunan Kelapa Sawit	Pelawan, Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
72.	Gabungan Kelompok Tani Putra Emas Nusantara	Perkebunan Kelapa Sawit	Kampar, Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B
73.	Geragas Utama, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Langkat, Sumatera Utara				Pasal 110 A/Pasal 110 B
74.	Graha Indosawit Andal Tangguh, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Seruyan, Kalimantan Tengah				Pasal 110 A/Pasal 110 B
75.	Haji Rizal Syamsir Alam, Abustami, Budi Arman, Ida Riyani, Nicky Rizal	Perkebunan Kelapa Sawit	Kampar, Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B
76.	Halim Saripul	Perkebunan Kelapa Sawit	Bengkalis dan Rokan Hilir, Riau			±48,80 dan ±102,41	Pasal 110 A/Pasal 110 B
77.	Hendrik	Perkebunan Kelapa Sawit	Langkat, Sumatera Utara				Pasal 110 A/Pasal 110 B
78.	Hj. Rosmaniar, Azriel, Hj. Rahminalyati, Dahlius	Perkebunan Kelapa Sawit	Kampar, Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B
79.	Indokencana Saterajaya, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Sumatera Utara				Pasal 110 A/Pasal 110 B
80.	Indra Wahyu Hidayat	Perkebunan Kelapa Sawit	Rokan Hulu, Rokan Hilir, Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B
81.	Inti Indosawit Subur, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Pelalawan, Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
82.	Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan	Perkebunan Kelapa Sawit	Pohuwato, Gorontalo				Pasal 110 A/Pasal 110 B
83.	JT Situmorang	Perkebunan Kelapa Sawit	Asahan , Sumatera Utara				Pasal 110 A/Pasal 110 B
84.	Juliany	Perkebunan Kelapa Sawit	Rokan Hilir, Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B
85.	Karunia Kencana Sejahtera, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah				Pasal 110 A/Pasal 110 B
86.	Kebun KUD Sawit Jaya dan Pratama Jaya	Perkebunan Kelapa Sawit	Kuantan Singingi, Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B
87.	Kebun Mandiri Sejahtera	Perkebunan Kelapa Sawit	Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur				Pasal 110 A/Pasal 110 B
88.	Kelompok Tani Inti Raya	Perkebunan Kelapa Sawit	Kuantan Singingi, Riau			±133,50	Pasal 110 A/Pasal 110 B
89.	Kelompok Tani Maju Rejeki	Perkebunan Kelapa Sawit	Musi Banyuasin, Sumatera Selatan				Pasal 110 A/Pasal 110 B
90.	Kelompok Tani Mamahan Santun Harsana	Perkebunan Kelapa Sawit	Pelalawan, Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B
91.	Kelompok Tani Mekar Sari	Perkebunan Kelapa Sawit	Musi Banyuasin, Sumatera Selatan				Pasal 110 A/Pasal 110 B
92.	Kelompok Tani Nusantara Sejahtera	Perkebunan Kelapa Sawit	Kampar, Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
93.	Kelompok Tani Tani Makmur	Perkebunan Kelapa Sawit	Musi Banyuasin, Sumatera Selatan				Pasal 110 A/Pasal 110 B
94.	Kencana Acidindo Perkasa, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Lampung				Pasal 110 A/Pasal 110 B
95.	Kepala Desa Bukit Lingkar	Perkebunan Kelapa Sawit	Indragiri Hulu, Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B
96.	Kepala Desa Buluh Rampai	Perkebunan Kelapa Sawit	Indragiri Hulu, Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B
97.	Kepala Desa Talang Mulya	Perkebunan Kelapa Sawit	Indragiri Hulu, Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B
98.	Kepala Kelurahan Pangkalan Kasai	Perkebunan Kelapa Sawit	Indragiri Hulu, Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B
99.	Koperasi Cempaga Perkasa	Perkebunan Kelapa Sawit	Kotim, Kalimantan Timur				Pasal 110 A/Pasal 110 B
100.	Koperasi Unit Desa Tungkul Ulu	Perkebunan Kelapa Sawit	Tanjung Jabung Barat, Jambi				Pasal 110 A/Pasal 110 B
101.	Limpah Sejahtera, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Ketapang, Kalimantan Barat				Pasal 110 A/Pasal 110 B
102.	M. Natsir	Perkebunan Kelapa Sawit	Banyuasin, Sumatera Selatan				Pasal 110 A/Pasal 110 B
103.	Marunda Grahamineral, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Barito Selatan, Kalimantan Tengah				Pasal 110 A/Pasal 110 B
104.	Muhammad Yusuf, dkk	Perkebunan Kelapa Sawit	Bengkalis, Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B
105.	Muniwood Indah Industri, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
106.	Nusamas Griya Lestari, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Morowali Utara, Sulawesi Tengah				Pasal 110 A/Pasal 110 B
107.	Panca Supadman	Perkebunan Kelapa Sawit	Banyuasin, Sumatera Selatan				Pasal 110 A/Pasal 110 B
108.	Raskita, CV	Perkebunan Kelapa Sawit	Karo, Sumatera Utara				Pasal 110 A/Pasal 110 B
109.	Riau Island Development, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Bintan, Kepulauan Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B
110.	Samingan	Perkebunan Kelapa Sawit	Rokan Hulu, Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B
111.	Sanny Meigiawati Ningsih	Perkebunan Kelapa Sawit	Pelalawan, Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B
112.	Sawit Harum Lestari, PT	Perkebunan Kelapa Sawit					Pasal 110 A/Pasal 110 B
113.	Sawit Lamandau Jaya, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Lamandau, Kalimantan Tengah				Pasal 110 A/Pasal 110 B
114.	Adi Susanto, dkk	Perkebunan Kelapa Sawit	Bengkali , Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B
115.	Socfin Indonesia, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara				Pasal 110 A/Pasal 110 B
116.	Sumargo	Perkebunan Kelapa Sawit	Musi Banyuasin, Sumatera Selatan				Pasal 110 A/Pasal 110 B
117.	Sumatera Agro Mandiri, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Sarolangun, Jambi				Pasal 110 A/Pasal 110 B
118.	Suparman	Perkebunan Kelapa Sawit	Banyuasin, Sumatera Selatan				Pasal 110 A/Pasal 110 B

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
119.	Suprpto, Afridawati, Syamsir, Amri, Herman, Hendra	Perkebunan Kelapa Sawit	Kampar, Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B
120.	Surya Andalan Primatama, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Bengkulu				Pasal 110 A/Pasal 110 B
121.	Tanah Hijau Semesta, PT	Perkebunan Kelapa Sawit					Pasal 110 A/Pasal 110 B
122.	Telangkaindo Permai, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Pekanbaru, Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B
123.	Tjiong Pak Tjiong alias Sulisty dkk	Perkebunan Kelapa Sawit	Padang Lawasan Utara dan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara				Pasal 110 A/Pasal 110 B
124.	Tony Rameses Napitupulu	Perkebunan Kelapa Sawit	Kampar, Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B
125.	Tunas Sawaerma, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Boven Digoel, Papua Selatan				Pasal 110 A/Pasal 110 B
126.	Wahanà Agrotama Makmur Perkasa, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Pulang Pisau, Kalimantan Tengah				Pasal 110 A/Pasal 110 B
127.	MIA Ocean Lyfe, PT	Real Estate	Kab. Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat	HL, HP		±153,76	Pasal 110 B
128.	Hans Buana Inti Guna Lestari, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Kab. Bangka Tengah, Bangka Belitung	HP		±27,81	Pasal 110 A/Pasal 110 B

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
129.	Cahaya Pelita Andhika, PT (Keberatan Atas Pemasangan PATOK)	Perkebunan Kelapa Sawit	Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara			±153,50	Pasal 110 A/Pasal 110 B
130.	Kepala Desa Koto Agro	Perkebunan Kelapa Sawit	Kab. Kampar, Riau			±25	Pasal 110 A/Pasal 110 B
131.	Cahaya Bukit Magrabat, PT	Penginapan	Kab. Kepulauan Mentawai, Sumatera abrat	HP		±2	Pasal 110 A/Pasal 110 B
132.	Pantai Cermiin Indah Lestari, PT	Pariwisata	Batam, Kepulauan Riau			±95,16	Pasal 110 A/Pasal 110 B
133.	Ricky Kurniawan Kertapersada, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Kab. Muaro Jambi, Jambi			±300	Pasal 110 A/Pasal 110 B
134.	Arga Tani Group, CV	Perkebunan Kelapa Sawit	Kab. Bangka Barat, Bangka Belitung	HP, HL		±393,46	Pasal 110 A/Pasal 110 B
135.	Koperasi Bandar Siantar Mandiri	Sarana & Prasarana	Kab. Simalungun, Sumatera Utara				Pasal 110 A/Pasal 110 B
136.	KUD Mulyo Mandiri	Perkebunan Kelapa Sawit	Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan	HPK		±300	Pasal 110 A/Pasal 110 B
137.	KUD Karya Makmur	Perkebunan Kelapa Sawit	Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan	HPK		±450,98	Pasal 110 A/Pasal 110 B
138.	Ladang Sawit Sejahtera, PT	Perkebunan Kelapa Sawit	Kab. Tanjung Jabung, Jambi				Pasal 110 A/Pasal 110 B

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
139.	Agrindo Persada Lestari, PT dan Maju Jaya Pelita, CV	Perkebunan Kelapa Sawit	Kab. Bangka Tengah, Bangka Belitung			±292	Pasal 110 A/Pasal 110 B
140.	KUD Gelugur Jaya	Perkebunan Kelapa Sawit	Kab. Indragiri Hulu, Riau			±200	Pasal 110 A/Pasal 110 B
141.	Koperasi Jasa Karya Mulia Halaban	Perkebunan Kelapa Sawit	Desa Bukit Selamat, Kec. Besitang, Sumatera Utara			±22,84	Pasal 110 A/Pasal 110 B
142.	KUD Barokah Jaya	Perkebunan Kelapa Sawit	Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan	HPK		±290,93	Pasal 110 A/Pasal 110 B
143.	KUD Sumber Barokah	Perkebunan Kelapa Sawit	Kab. Musibanyuasin, Sumatera Selatan	HPK		±129,10	Pasal 110 A/Pasal 110 B
144.	Koperasi Tani Siampo Pelangi	Perkebunan Kelapa Sawit	Kab. Kuantan Singingi, Riau			±721	Pasal 110 A/Pasal 110 B
145.	Mitrakarya Sentosa II	Perkebunan Kelapa Sawit	Ketapang, Kalimantan Barat				Pasal 110 A/Pasal 110 B
146.	Mitrakarya Sentosa II	Perkebunan Kelapa Sawit	Sanggau, Kalimantan Barat				Pasal 110 A/Pasal 110 B
147.	Adi, dkk	Perkebunan Kelapa Sawit	Pelalawan, Riau				Pasal 110 A/Pasal 110 B
148.	H. Amzar	Perkebunan Kelapa Sawit	Jambi				Pasal 110 A/Pasal 110 B
149.	Drs. Imam Sufi T, Ak, MBA	Perkebunan Kelapa Sawit	Musi Banyuasin, Sumatera Selatan				Pasal 110 A/Pasal 110 B

No.	Subyek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan			Luasan Indikatif Areal Terbuka (Ha)	Skema Penyelesaian Sesuai UU Cipta Kerja
			Wilayah Administratif	Kawasan Hutan	Kesesuaian Ruang		
150.	Roby Kurniawan	Perkebunan Kelapa Sawit	Musi Banyuasin, Sumatera Selatan				Pasal 110 A/Pasal 110 B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BIRO HUKUM,



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA